

**ANALISIS TERHADAP JAMINAN HAK NAFKAH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN PADA SISTEM HUKUM INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

OLGA TET ARDI SUKOWATI

C100142017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TERHADAP JAMINAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA SISTEM HUKUM INDONESIA

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

OLGA TET ARDI SUKOWATI

C 100142017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP JAMINAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN PADA SISTEM HUKUM INDONESIA**

**OLEH
OLGA TET ARDI SUKOWATI**

C100142017

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at., 22 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Hartanto, S.H.M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji) | (.....) |
| 2. | Septarina Budiwati, S.H, M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji) | (.....) |
| 3. | Syaifuddin Zuhdi, S.H, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji) | (.....) |



Dekan,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa didalam publikasi ilmiah ini tidak adanya karya yang pernah diajukan seseorang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan Saya mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Januari 2021

Penulis,



OLGA TET ARDI SUKOWATI

C100142017

ANALISIS TERHADAP JAMINAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA SISTEM HUKUM INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal dan jenis metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan; a) untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di Indonesia; b) untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di Indonesia; c) untuk mengetahui pengaturan hak anak di Malaysia dan Amerika. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Kedudukan anak dalam hukum Indonesia diatur dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komisi ini terbentuk atas dasar UU No. 23 Tahun 2002 yang diatur pada Pasal 74-76 dan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003, Pasal 330 KUHPdata, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Lingkup rumah tangga. Hak nafkah atas anak pada Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh hakim tidak memberikan putusan mengenai hak nafkah anak. Hak nafkah atas anak akibat perceraian dalam sistem hukum di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Pasal 41 (c); Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Hak-hak anak Malaysia sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611).. Region Amerika Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia (1948) Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia Diadopsi oleh Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Ke-9 di Bogota pada 1948 menyatakan semua manusia dilahirkan bebas dan sama, dalam martabat dan hak-hak, dan, karena dikaruniai oleh akal dan hati nurani, mereka harus saling memperlakukan terhadap sesamanya sebagai saudara.

Kata Kunci: hak anak, perlindungan hukum hak anak, penyelesaian hukum atas nafkah anak.

Abstract

This research is based on legal research conducted with a doctrinal approach and a type of normative juridical approach. The purpose of this research; a) to find out the position of children in law in Indonesia; b) to find out the position of children in law in Indonesia; c) to find out the arrangements of children's rights in Malaysia and America. The research results found are the position of children in Indonesian law regulated in the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), this commission was formed on the basis of Law No. 23 of 2002 regulated in Articles 74-76 and through Presidential Decree No. 77 of 2003, Article 330 of the Civil Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 2 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence; Household scope. Right to support children in Decision Number 405 / Pdt. G / 2013 / PA. Skh Judge does not give a decision regarding the child's living rights. The right to support a child due to a divorce in the legal system in

Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely: Article 41 (c); The court can require the ex-husband to provide living expenses and determine an obligation to his ex-wife. The rights of Malaysian children are regulated in the 2001 Children's Deed (Deed 611).

Keywords: children's rights, legal protection of children's rights, legal settlement of children's livelihoods

1. PENDAHULUAN

Kehadiran anak melalui proses kelahiran merupakan bagian daripada peristiwa hukum antara ikatan suami dan istri (pernikahan), konsekuensi daripada kelahiran anak adalah adanya hubungan hak dan kewajiban kepada orang tua. Setiap anak memiliki hak-hak khusus baik secara material berupa sandang, pangan dan juga papan. Selain itu anak memiliki hak imaterial seperti hak untuk beribadah, mendapatkan perhatian berupa kasih sayang serta interaksi sosial.

Tujuan daripada sebuah pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh sebab itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempersulit terjadinya sebuah perceraian. Orang tua diberikan hak untuk melakukan pemeliharaan kepada anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak tidak hanya meliputi nafkah lahir, akan tetapi juga nafkah batin semisal pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun (Arto, 2003).

Hak dan kewajiban dari suami istri dijelaskan pada Pasal 77 Ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam dimana hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga terdapat kewajiban suami maupun istri yang harus dijalankan atau dipenuhi (Subki, 2012). Hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga akan membentuk sebuah ketentraman maupun ketenangan hati, sehingga dengan tuntutan agama yaitu *sakinah mawadah dan warahmah* (Tihami dan Sahrani, 2014).

Beberapa hak anak yang dijelaskan, yang paling utama adalah hak nafkah (*alimentasi*). Pemenuhan hak nafkah anak adalah wujud daripada tujuan dilangsungkannya pernikahan yang bertujuan untuk melindungi keturunan (*hifz an-nasl*) (Mas'ud, 1995). Pemenuhan hak nafkah terhadap anak juga meliputi daripada sandang, pangan dan papan yang akan membantu terhadap kehidupan atau perkembangan anak secara optimal. Pada Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak biaya pendidikan anak (Hudaya, 2013). QS. An-Nisa (34) menjelaskan bahwa; *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*.

Perkembangan zaman memberikan perubahan yang begitu signifikan terhadap tata cara berumah tangga, dimana terdapat banyak masalah rumah tangga mengenai mengenai suami tidak menjalankan tanggungjawabnya secara baik yang seharusnya suami sebagai pelindung maupun mengayomi istri dan anaknya.

Pernikahan tidak selamanya berjalan baik, dimana terkadang terdapat sebuah konflik. Konflik yang tidak kunjung mendapatkan solusi berupa perdamaian akan berujung pada perceraian. Perceraian yang diatur dalam Islam adalah wujud sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama jika dalam kondisi darurat, hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah terkait perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *thalaq*. Pada kalimat lain dijelaskan bahwa: *tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada thalaq*” (HR. Abu Dawud) (Sipahutar, 2016).

Berdasarkan Pasal 39 UUP No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.

Pada kasus perceraian Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh yang mana pihak Penggugat dilakukan oleh istri. Penggugat melakukan upaya hukum berupa cerai dengan alasan bahwa tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengumpat atau berkata kasar kepada penggugat, melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat atas penghasilan yang diperoleh tergugat selama ini. Hakim dalam putusan tersebut tidak memberikan atau membebaskan kepada pihak tergugat mengenai tanggungjawab nafkah kepada penggugat dan anaknya. Hakim hanya memutuskan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Nafkah yang berarti belanjakan kebutuhan pokok yang dimaksudkan yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang yang membutuhkan. Sebagian ahli fiqih memberikan pendapat bahwa jenis kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, dan papan, sementara yang lain beranggapan bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan (Nur, 2003).

Nafkah merupakan biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak baik saat pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian. Nafkah bersifat elastis dan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi yang melingkupinya berupa fakta sosial serta perkembangan kebutuhan hidup. Nafkah meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya kesehatan (Yasin, 2006).

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tidak dimuatnya ketentuan mengenai nafkah kepada anak pada Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh tidak sejalan dengan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kewajiban mantan suami berupa mut'ah, nafkah iddah (bila tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Jika penggugat seorang istri tidak

menuntut hak dalam gugatan maka seorang hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah, iddah serta nafkah kepada anak.

Pada Pasal 413 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu : pertama, kematian, kedua, perceraian, ketiga, putusnya pengadilan. Apabila perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, maka akibat-akibat hukumnya berdampak kepada anak-anak yang di tinggalkan, ataupun terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan.

Di Brunei diberlakukan juga aturan yang menyatakan bahwa jika pihak suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau di Brunei diistilahkan dengan cerai tebus talak (Syarifuddin, 2007). Kadi akan menilai jumlah yang perlu dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut serta mendaftarkan perceraian itu (Cahyani, 2015).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan analisis penelitian mengenai nafkah pada anak berdasarkan peraturan hukum positif dengan judul: “Analisis Terhadap Jaminan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Pada Sistem Hukum Di Indonesia”

Rumusan penelitian yang akan diteliti diantaranya adalah sebagai berikut: a) Bagaimana kedudukan anak dalam hukum di Indonesia?; b) Bagaimana hak nafkah atas anak pada hukum di Indonesia?; c) Bagaimana pengaturan hak anak di Malaysia dan Amerika? Tujuan daripada penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di Indonesia; b) Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di Indonesia; c) Untuk mengetahui pengaturan hak anak di Malaysia dan Amerika.

2. METODE

Penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara

jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu; a) Bagaimana kedudukan anak dalam hukum positif di Indonesia?; b) Bagaimana hak nafkah atas anak pada hukum positif di Indonesia?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan anak dalam hukum di indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komisi ini terbentuk atas dasar UU No. 23 Tahun 2002 yang diatur pada Pasal 74-76 dan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Komisi ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut; a) Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; b) Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang; c) Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama; d) Menyampaikan dan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama presiden, DPR, instansi pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah; e) Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak; f) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komita Hak Anak PBB; g) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layak nya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai perananyang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana

kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdara

Kedudukan anak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, yaitu;

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar bias dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15 Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan Khusus yang dimaksud adalah; a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c) penyediaan sarana dan prasarana khusus; d) penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f)

pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan; g) perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3.2 Hak nafkah atas anak pada hukum di Indonesia

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

Pasal 191

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- (6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas: Pasal 116; a) Suami melanggar Ta'lik Talak; b) Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

Hak nafkah atas anak akibat perceraian dalam sistem hukum di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Pasal 41 (c); Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kewajiban mantan suami berupa mut'ah, nafkah iddah (bila tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Jika penggugat seorang istri tidak menuntut hak dalam gugatan maka seorang hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah, iddah serta nafkah kepada anak.

Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh menjelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolabab, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 571//46/XI/2011 tanggal 13 November 2011 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa, Tergugat telah melakukan pelanggaran ta'lik talak angka 2 dan 4, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun, oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab Tanwirul Qulub yang berbunyi: "Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud"; dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan".

Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh dalam putusannya hakim tidak memberikan putusan mengenai hak nafkah anak, diantara putusannya adalah; a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; c) Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi; d) Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); e) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; f) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

QS. Al-Baqarah: 33 menjelaskan kewajiban memberikan nafkah seorang suami, yaitu Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. QS. An-Nisa’, (4: 34) bahwa Laki-laki adalah pelindung kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dengan sabagian yang lainnya (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka”. Q.S. at-Thalaq (7); Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

3.3 Pengaturan hak anak di Malaysia dan Amerika

Di Negara Malaysia masalah hak-hak anak sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611). Anak-anak yang dilindungi di bawah akta 2001 ini terdiri dari: a) anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan, b) anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, c) perdagangan dan pelarian anak-anak, d) anak-anak yang melakukan kesalahan jinayah, e) anakanak yang tidak dikawal.

Pengaturan Hak Anak Di Amerika diatur pada Region Amerika Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia (1948) Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia Diadopsi oleh Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Ke-9 di Bogota pada 1948, yaitu;

Pasal 5

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap serangan yang kejam atas kehormatannya, nama baiknya dan kehidupan pribadi dan keluarganya.

Pasal 7

Semua perempuan. selama masa hamil dan menyusui, dan semua anak-anak berhak atas perlindungan, perawatan dan bantuan khusus.

Pasal 9

Setiap orang berhak atas penghormatan rumah tangganya.

Pasal 12

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, yang harus didasarkan pada asas-asas kemerdekaan, moralitas dan solidaritas manusia. Demikian juga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang akan mempersiapkannya untuk mencapai kehidupan yang layak, untuk meningkatkan penghidupannya dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Hak untuk mendapatkan pendidikan mencakup hak atas peluang yang sama dalam setiap hal, sesuai dengan kemampuan dasar, kemanfaatan dan keinginan untuk mendayagunakan semua sumber daya sehingga negara atau masyarakat dalam suatu posisi harus mengupayakan penyediaannya. Setiap orang berhak menerima paling sedikit dalam tingkatan dasar dengan cuma-cuma.

Pasal 30

Menjadi tanggung jawab setiap orang untuk membantu, menunjang, mendidik dan melindungi anakanaknya yang masih kecil dan adalah tanggung jawab anak-anak untuk selalu menghormati orangtuanya, dan untuk membantu, menunjang dan melindungi mereka apabila mereka memerlukannya.

Sengketa pemeliharaan anak termasuk sebagai masalah hukum perdata dan diselesaikan oleh para pihak atau melalui pengadilan. Secara umum anak yang berumur dibawah 7 tahun diserahkan pemeliharaannya kepada si ibu. Meskipun tidak terdapat perjanjian terhadap putusan hakim, pengadilan Filipina selalu memperhatikan putusan pemeliharaan anak yang diputus oleh hakim asing dalam memutus sengketa putusan anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kedudukan anak dalam hukum Indonesia diatur dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komisi ini terbentuk atas dasar UU No. 23 Tahun 2002 yang diatur pada Pasal 74-76 dan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Ketentuan mengenai kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia juga dijelaskan pada Pasal 330 KUHPperdata. Kedudukan anak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan baik dalam keluarga, sekolah. Selain itu kedudukan anak agar terhindar daripada kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Lingkup rumah tangga.

Hak nafkah atas anak pada Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. Skh hakim tidak memberikan putusan mengenai hak nafkah anak. Hak nafkah atas anak akibat perceraian dalam sistem hukum di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Pasal 41 (c); Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa kewajiban mantan suami berupa mut'ah, nafkah iddah (bila tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Jika penggugat seorang istri tidak menuntut hak dalam gugatan maka seorang hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah, iddah serta nafkah kepada anak.

Di Negara Malaysia masalah hak-hak anak sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611). Region Amerika Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia (1948) Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia Diadopsi oleh Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Ke-9 di Bogota pada 1948 menyatakan semua manusia dilahirkan bebas dan sama, dalam martabat dan hak-hak, dan, karena dikaruniai oleh akal dan hati nurani, mereka harus saling memperlakukan terhadap sesamanya sebagai saudara. Pemenuhan tanggung jawab semua orang merupakan suatu prasyarat bagi hak-hak semua manusia.

4.2 Saran

Untuk Pengadilan Agama, diharapkan kedepannya mengupayakan untuk melakukan mediasi semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian yang semakin meningkat di Indonesia. Untuk hakim, diharapkan kedepannya dalam memutuskan perkara juga menetapkan nafkah secara jelas kepada anak yhasil daripada perceraian sehingga terdapat kepastian hukum dan bukan hanya kepastian secara agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti. (2003). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- As Subki, Ali Yusuf . (2012). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Oslam*, Jakarta: Amzah
- Cahyani, A. Intan, *Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2 Nomor 2, 2015
- H. M. A. Tihami dan Sahrani, Sohari. (2014). *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press
- Hudaya, Hairul. (2013). *Jurnal Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadist dan Kompilasi Hukum Islam)*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, Nomor 1 Januari-Juni 2013
- Mas'ud, Muhammad Khalid. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: AL-Ikhlas
- Nur, Djamaan. (2003). *Fiqh Munkahat*, Semarang: CV. Thoha Putra, hal. 19. Fatihuddin Abul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang
- Sipahutar, Anjani *et.all*. (2016). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam. *USU Law Jurnal: Volume 4 Nomor 1 Januari 2016*
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yasin, Fatihuddin Abul. (2006). *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang